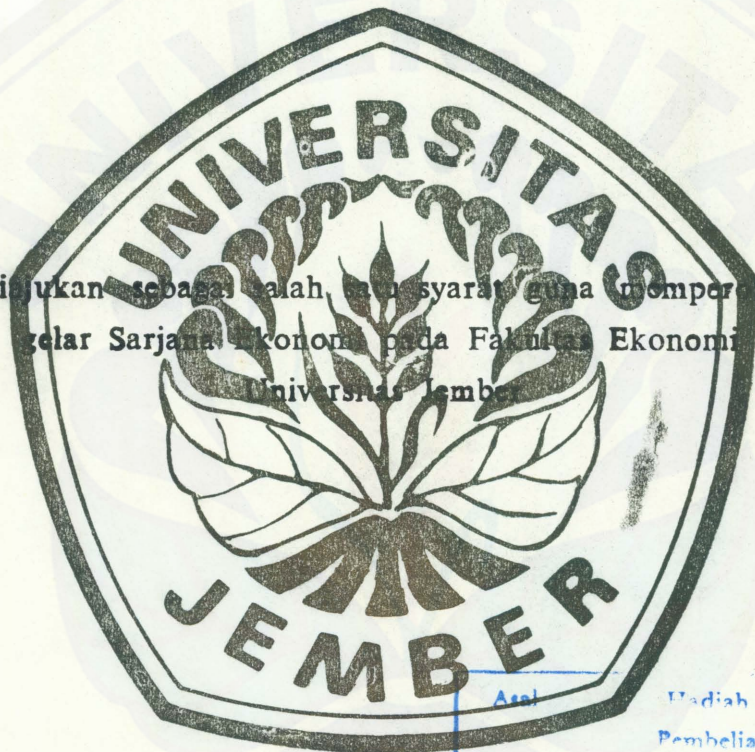


**ANALISIS PENETAPAN SEKTOR PRIORITAS DALAM  
PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO  
TAHUN 1994 - 1998**

**SKRIPSI**

Disajikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

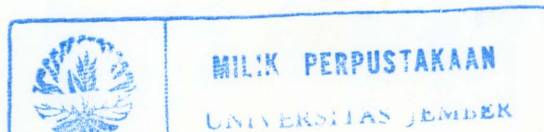


Oleh

*Erna Drawati*  
NIM. 960810101041

Atas	Mediah	Klasifikasi 338.9 IRA a
Terima Tgl: 14 OCT 2000	Pembelian	
No. Induk: 10 230 11 / 2000		

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2000**



## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENETAPAN SEKTOR PRIORITAS DALAM PEMBANGUNAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO TAHUN 1994-1998

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Erna Irawati

N. I. M. : 960810101041

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

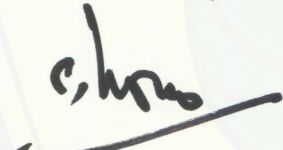
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

16 September 2000


dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

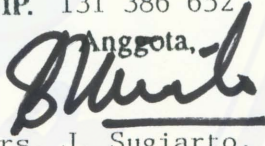
Ketua,

  
Drs. Soeyono  
NIP. 131 386 653

Sekretaris,

  
Drs. Badjuri, ME.  
NIP. 131 386 652

Anggota,

  
Drs. J. Sugiarto, SU.  
NIP. 130 610 494



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,



  
Drs. H. Sukusni, M.Sc.  
NIP. 130 350 764

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Sektor Prioritas Dalam Pembangunan  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 -1998

Nama Mahasiswa : Erna Irawati

N I M : 960810101041

Jurusan : IESP

Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I



Drs. J Sugiarto, SU

NIP. 130 610 494

Pembimbing II



Drs. Agus Lutfhi, MSi

NIP. 131 877 450

Ketua Jurusan



Dra. Aminah

NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : Agustus 2000

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan rasa cinta kasih yang mendalam serta rasa terima kasihku kepada ayah dan bundaku yang telah mendidik dan merawatku dengan penuh kasih sayang.



## MOTTO:

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

( QS. Alam Nasyrah: 6-8 )

Barang siapa ditanya tentang ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengendalikan orang itu dengan kendali api neraka.

( Al-Hadist )

Menyadari kekurangan diri adalah tenaga untuk mencapai cita-cita. Berusaha untuk mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian yang luar biasa.

( Hamka )

## ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor atau sub sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro selama periode tahun 1994 – 1998 dan untuk mengetahui peranan pergeseran sektor atau sub sektor prioritas dalam sumbangannya terhadap nilai tambah bruto.

Penelitian ini menggunakan data PDRB Kabupaten Bojonegoro dan PDRB Propinsi Jawa Timur pada tahun 1994 – 1998 atas dasar harga konstan tahun 1993.

Untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan digunakan metode analisis Location Quatient. Sedangkan untuk mengetahui pergeseran sektor atau sub sektor menggunakan analisis Coefficient Resuffle.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Location Quatient, maka selama periode analisis yang menjadi sektor prioritas adalah Sektor Pertanian, Sektor Jasa-jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sedangkan hasil perhitungan dengan metode analisis Coefficient Resuffle selama periode analisis sektor yang mengalami pergeseran menguat adalah Sektor Pertanian; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

## KATA PENGANTAR

Seiring dengan terselesainya skripsi ini, penulis panjatkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat Illahi Robbi atas segala limpahan Rahman dan Rohim-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. J. Sugiarto, SU selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Lutfhi,MSi selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan koreksi, saran serta petunjuk yang bermanfaat;
2. Bapak Drs. H. Sukusni, MSc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Kepala Kantor Statistik Daerah Tingkat II Bojonegoro beserta staf yang telah melayani dengan baik;
4. Saudaraku: Mbak Anis, Mas Mamak, Yufron serta Zaenal yang telah memberikan banyak inspirasi bagi penulis;
5. Mas Sholikhhan, Anik, Uul, Luluk, serta Diana yang telah banyak memberi bantuan bagi penulis;
6. Ani, Eka, Novi, Sukma, Irma, Mas Edi serta semua sahabat di Halmahera I/21
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga dengan segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai amal baik dan mendapatkan balasan dari-Nya.

Jember, Agustus 2000

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Tinjauan Sebelumnya.....	5
2.2. Landasan Teori.....	6
III. METODE PENELITIAN.....	14
3.1. Rancangan Penelitian.....	14
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	14
3.3. Metode Analisis.....	14
3.4. Definisi Variabel Operasional.....	15
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1. Gambaran Umum.....	17
4.2. Analisis Data.....	23
4.3. Pembahasan.....	36
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
5.1. Kesimpulan.....	40
5.2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 1994 – 1998.....	18
2.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998.....	20
3.	Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998.....	21
4.	Distribusi PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 – 1998.....	22
5.	Kelompok Sektor Berpotensi Yang Terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 – 1998.....	24
6.	Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pada Tahun 1994 – 1998 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993.....	26
7.	Hasil Perhitungan LQ Sektor Jasa-jasa Pada Tahun 1994 – 1998 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Bojonegoro.....	27
8.	Perhitungan LQ Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Pada Tahun 1994 – 1998 di Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993.....	28
9.	Perhitungan LQ Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Pada Tahun 1994 – 1998 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Bojonegoro.....	30
10.	Hasil Perhitungan CR PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Atas PDRB Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Sektor Tahun 1998.....	31
11.	Hasil Perhitungan CR Sub Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 1998.....	32

12. Hasil Perhitungan CR Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998.....	33
13. Hasil Perhitungan CR Sub Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998.....	34
14. Hasil Perhitungan CR Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 1998.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 – 1998.....	1
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Propinsi Jawa Timur Tahun 1994 – 1998.....	2
3.	Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1994 – 1998.....	3
4.	Kontribusi Sektoral PDRB Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1994 –1998.....	4
5.	Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 – 1998.....	5
6.	Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994.....	6
7.	Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1995.....	7
8.	Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1996.....	8
9.	Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1997.....	9
10.	Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1998.....	10
11.	Koefisien Pergeseran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 – 1998.....	11

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan di seluruh daerah perlu ditingkatkan terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya berdasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (GBHN, Tap MPR / IV / 1999).

Pembangunan regional adalah bagian dari pembangunan nasional. Munculnya masalah-masalah pembangunan regional terjadi karena adanya keterbatasan potensi sumber-sumber yang ada, penyebaran sumber-sumber yang tidak merata serta jumlah penduduk yang semakin bertambah. Berkaitan dengan hal tersebut maka kebutuhan akan pengamatan regional yang cermat dan menyeluruh semakin terasa agar kebijaksanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah dapat ditentukan secara lebih tepat, terarah dan sesuai dengan potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing wilayah (Nuryasman, 1996 : 239). Oleh sebab itu perlu disusun suatu perencanaan yang terkoordinir baik dalam tujuan-tujuannya maupun dalam peralatan kebijaksanaannya yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Hal itu untuk menghindari inkonsistensi dalam suatu perencanaan pembangunan regional.



Perencanaan pembangunan regional yang dimaksud adalah suatu program strategi pemerintah dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari nasional, supaya terjadi perkembangan ke arah tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah :

- a. mencapai kenaikan pendapatan perkapita yang cepat,
- b. menyediakan kesempatan kerja yang cukup,
- c. mengadakan redistribusi pendapatan supaya lebih merata,
- d. mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antara daerah yang satu dengan daerah yang lain,
- e. mengubah struktur perekonomian agar tidak berat sebelah (Kadariyah, 1972: 3).

Masing-masing tujuan tersebut penting, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertentangan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu dalam perencanaan perlu ditentukan prioritas tujuan sesuai dengan karakteristik dan keadaan suatu daerah. Tujuan perencanaan suatu daerah adalah suatu perencanaan yang mempunyai ciri-ciri ekonomi sosial, serta mempertimbangkan aspek fisik lingkungan.

Penyusunan rencana regional di tiap-tiap sektor (pertanian, industri, prasarana dan jasa) harus ditetapkan sasaran dan target pembangunan tanpa harus menunggu suatu *regional plan*. Setiap sektor dapat memulai penyusunan rencananya di sektor masing-masing dimana suatu rencana yang demikian merupakan hasil konsultasi yang terus-menerus antara perencanaan sektoral dan regional. Konsultasi itu dapat dirumuskan dan disempurnakan tujuan-tujuan dari sasaran pembangunan .

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan nasional adalah pembangunan daerah. Jawa Timur sebagai salah satu propinsi di Indonesia pertumbuhan ekonominya pada tahun 1996 dan tahun 1997 adalah 8,26% dan 5,02%. Pada tahun 1998 perekonomian Jawa Timur mengalami kontraksi hingga 16,22% karena adanya krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Dengan demikian keberhasilan pembangunan di Jawa Timur akan

sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di Jawa Timur nantinya juga dipengaruhi oleh pembangunan sektoral dan pembangunan regional di masing-masing daerah tingkat II ( BPS Propinsi Jawa Timur, 1999: 425 ).

Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Timur merupakan daerah yang sangat berpotensi dalam menyumbangkan pertumbuhan pendapatannya bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Secara kuantitatif peranan setiap sektor di Bojonegoro dalam membentuk PDRB dapat dilihat pada tahun 1994 –1998, proporsi sektor pertanian terhadap PDRB rata-rata 43,50%. Untuk sektor bangunan 4,57%, sektor industri pengolahan proporsinya rata-rata 8,80%. Sektor perdagangan , hotel dan restoran proporsinya rata-rata 14,54%, dan sektor jasa-jasa lainnya mempunyai proporsi 15,23% dari PDRB pada periode 1994 –1998 ( BPS Kabupaten Bojonegoro, 1999 : 166 ).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan kebutuhan akan pembangunan regional yang cermat dan menyeluruh, maka perlu adanya suatu kebijaksanaan yang mendukung dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang terbatas agar kebijaksanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah dapat ditentukan secara lebih tepat, terarah dan sesuai dengan potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing wilayah. Peranan sektor ekonomi sangat besar dalam suatu daerah, namun belum ada penetapan sektor yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan ekonomi, maka dari itu perlu adanya kebijaksanaan yang terarah bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakan penelitian tentang :

1. sektor ekonomi apa yang dapat dipilih untuk diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro;
2. seberapa besar kekuatan suatu sektor sebagai prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro .

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. sektor ekonomi yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro pada tahun 1994 –1998;
2. kekuatan sektor tertentu sebagai prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak pemerintah daerah dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat bagi pengembangan daerah dan pengembangan sektor-sektor ekonomi di Daerah Tingkat II Bojonegoro.
2. Sebagai bahan masukan lebih lanjut bagi peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Pada perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo terlihat pentingnya sektor prioritas dalam suatu perencanaan regional sebab peningkatan nilai tambah pada sektor prioritas selain meningkatkan PDRB daerah juga meningkatkan nilai tambah pada sektor non prioritas. Berdasarkan metode LQ yang termasuk sebagai sektor prioritas di Kabupaten Sidoarjo adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor pengangkutan dan komunikasi dimana masing-masing sektor secara berurutan mempunyai nilai LQ pada tahun 1987-1996 rata-rata adalah 2,218; 4,323; 1,028 dan 1,485 (Ibrahim M,1997:49).

Di Kotamadya Surabaya sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu prioritas pembangunan di samping 5(lima) sektor ekonomi lainnya. Sektor ekonomi yang termasuk sebagai sektor basis di Kotamadya Surabaya adalah : Sektor Bangunan; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Listrik,Gas dan Air Bersih; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dimana masing-masing sektor selama tahun 1993-1997 secara berurutan mempunyai nilai LQ sebesar 3,432; 2,102; 1,322; 1,907 dan 2,521. Sektor-setor tersebut merupakan sektor basis karena memiliki nilai LQ lebih besar dari 1(satu). (Astuti Diah P,1998:50)

Dalam perekonomian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terdapat sektor yang menjadi tulang punggung, yaitu sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis karena memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian dan merupakan sektor basis. Dengan analisis LQ membuktikan bahwa industri pengolahan di Jawa Timur menduduki potensi sebagai basis ekonomi dengan nilai LQ antara 1,2995 sampai 1,3001 yang berarti merupakan sektor basis (Widodo D.T, 1999:44).



## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan bersumber pada faktor-faktor aglomerasi (pengelompokan) dari teori-teori lokasi industri. Menurut pendapat ahli ekonomi Perroux (1964; 92) dinyatakan bahwa fakta dasar dari perkembangan sosial sebagaimana halnya dengan perkembangan industri adalah sebagai berikut :

“ pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek atau pengaruh yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian”.

Lebih spesifik lagi Budiharsono (1989; 58) mendefinisikan kutub pertumbuhan regional adalah sebagai berikut :

“ sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang beralokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut keseluruh daerah pengaruhnya”.

Teori kutub pertumbuhan regional ini sangat populer dan menjadi suatu gagasan yang digunakan dimana-mana karena disamping digunakan untuk memahami struktur regional, teori ini juga merupakan suatu metode untuk memprediksikan perubahan-perubahan struktur tersebut dan juga untuk merumuskan pemecahan berbagai persoalan-persoalan regional tertentu.

Dalam membicarakan teori kutub pertumbuhan, maka konsep ekonomi dasar yang harus dipenuhi adalah :

1. konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan propulsif
2. konsep polarisasi
3. konsep *spread effects* dan *trickling down effects*

Berkaitan dengan pentingnya sektor pemimpin (sektor yang mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya) untuk memacu pertumbuhan, maka selanjutnya pembahasan hanya ditekankan pada konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan propulsif, karena pada konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan propulsif dinyatakan bahwa pusat kutub pertumbuhan

terdapat perusahaan-perusahaan propulsif yang besar, yang termasuk dalam *leading industries* yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Ciri-ciri dari *leading industri* yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. industri relatif baru dan dinamis, serta mempunyai teknologi yang relatif tinggi,
2. permintaan terhadap produksinya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi,
3. mempunyai kaitan antar sektor ( kaitan kedepan dan kebelakang ).

Sedangkan ciri-ciri dari perusahaan propulsif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. perusahaan tersebut relatif besar,
2. dapat menimbulkan dorongan-dorongan pertumbuhan yang nyata kepada lingkungan,
3. mempunyai kemampuan berinovasi yang tinggi,
4. perusahaan termasuk dalam suatu industri yang sedang timbul dengan cepat.

Dengan menganalisa beberapa ciri-ciri tersebut, maka *leading industries* dan perusahaan-perusahaan propulsif dapat diidentifikasi, walaupun kebanyakan kutub pertumbuhan tersebut mempunyai *leading industries* tetapi tidak semua industri seperti itu akan menimbulkan kutub pertumbuhan, hal ini dikarenakan adanya keuntungan-keuntungan eksternal yang jauh lebih besar di daerah-daerah lain.

Teori kutub pertumbuhan juga merupakan sarana kebijaksanaan, karena :

1. dari segi berbagai macam keuntungan aglomerasi (pengelompokan), teori ini cenderung untuk menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan,
2. dari segi anggaran belanja negara, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah lebih murah dampak pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang besar,
3. *spread effects* yang ditimbulkan oleh titik pertumbuhan akan membantu memecahkan permasalahan-persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang sedang merosot (Budiharsono S, 1989:24 ).

### 2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Nilai tambah yang dihitung dari seluruh sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro apabila dijumlahkan akan membentuk Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Dalam kaitannya dengan PDRB ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami, yaitu :

#### 1. Pengertian dari PDRB

PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah (*region*) tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas dasar faktor produksi.

Oleh karena itu PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tertentu.

#### 2. Jenis-jenis PDRB

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah semua agregat pendapatan yang dinilai atas harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB.
- b. PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar adalah semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

### 3. Manfaat atau Kegunaan PDRB

Perhitungan PDRB mempunyai manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak yang dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu :

- a. mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu daerah. Artinya dari perhitungan PDRB dapat diketahui suatu daerah tersebut daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa. Dengan dasar perhitungan tersebut dapat pula diketahui arah perekonomian daerah bergerak dan lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu yang telah diambil sehingga mampu memberikan kesimpulan yang benar.
- b. membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu artinya dalam menghitung PDRB angka yang dicatat merupakan penjumlahan angka-angka selama jangka waktu tertentu misalnya satu tahun, sehingga dapat membandingkan dari tahun ke tahun. Perbandingan ini dapat memberikan keterangan terjadinya kenaikan atau penurunan, terjadinya perubahan struktur ekonomi atau tidak dan lain-lain. Angka perbandingan dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam melaksanakan program-program pembangunan selanjutnya.
- c. membandingkan perekonomian antar daerah. Penghitungan PDRB dapat digunakan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerahnya dengan daerah lain. Perbandingan ini penting bagi suatu daerah karena dapat diketahui tingkat kemajuan daerah tersebut, termasuk kriteria daerah maju atau daerah yang masih terbelakang.
- d. merumuskan kebijaksanaan pemerintah . Penghitungan PDRB dapat digunakan untuk membantu merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah. Dengan mengetahui besarnya PDRB dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisinya pada tiap-tiap sektor ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan per kapita pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebijaksanaan daerah dan penggunaan dana investasi.

#### 4. Metode Penghitungan dari PDRB

Pendapatan Regional dapat dihitung melalui dua metode yaitu : (1) metode langsung, (2) metode tidak langsung. Yang dimaksud dengan metode langsung adalah metode penghitungan dengan mempergunakan data daerah secara terpisah sama sekali dengan data nasional sehingga hasil perhitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokator.

Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam pendekatan yaitu :

##### a. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi bermaksud menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara masing-masing total produk bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara.

##### b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan maka nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Dalam hal sektor pemerintahan dan dalam usaha yang sifatnya mencari keuntungan surplus usaha tidak diperhitungkan.

##### c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau dilihat dari segi penggunaan maka total supply dari barang dan jasa itu digunakan untuk :

- 1) konsumsi rumah tangga,
- 2) konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,
- 3) konsumsi pemerintah,
- 4) pembentukan modal tetap bruto,
- 5) perubahan stock,
- 6) ekspor netto.

Untuk metode tidak langsung dilakukan dengan metode alokasi pendapatan nasional, yaitu dengan menghitung pendapatan regional dengan cara mengalokasikan angka pendapatan nasional untuk tiap-tiap daerah dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan:

- 1) nilai produksi bruto atau netto,
- 2) jumlah produksi fisik,
- 3) tenaga kerja,
- 4) penduduk,
- 5) alokator tidak langsung.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah secara nasional untuk setiap sektor atau sub sektor.

### 2.2.3 Location Quatient

Salah satu alat analisis untuk menganalisis peranan sektor pembangunan dalam suatu daerah adalah dengan menggunakan Location Quatient yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain. Analisis dengan Location Quatient ini merupakan alat sederhana untuk mengetahui apakah suatu daerah (sub daerah) sudah seimbang atau belum dalam kegiatan tertentu, yang dapat dilihat dari besarnya angka LQ. Dalam



literatur pembangunan daerah disebutkan bahwa struktur perumusan LQ memberikan beberapa nilai sebagai berikut : " Bahwa sektor di suatu daerah yang mempunyai nilai LQ di atas satu merupakan sektor kuat, sehingga daerah yang bersangkutan secara potensial merupakan pengekspor produk sektor tersebut ke daerah lain. Sebaliknya suatu daerah merupakan pengimpor produk sektor tersebut dari daerah lain jika nilai LQ-nya dibawah satu"(Azis I J,1994:244).

Pada dasarnya tehnik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di suatu daerah yang dianalisis dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien dapat digunakan satuan pendapatan, tenaga kerja, jumlah penduduk, luas tanah dan nilai tambah. Berkaitan dengan hal ini satuan koefisien dalam analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan satuan nilai tambah (Azis I J, 1994:245).

Alat analisis ini sebenarnya bukan satu-satunya alat analisis untuk menganalisis kemampuan daerah dalam kegiatan tertentu, tetapi ada tehnik lain. Namun dalam hal ini analisis Location Quatient yang sering digunakan karena akan lebih mudah dalam penggunaannya juga data yang diperlukan lebih mudah diperoleh karena data yang diperlukan bersifat agregate yang biasanya tersedia namun begitu tetap tidak mengurangi arti pentingnya dalam hal yang diperolehnya. Tetapi penggunaan Location Quatient dalam analisa ini ada kelemahan-kelemahannya, di antaranya ialah bahwa: (Kadariah,1982:72)

1. selera dan pola pengeluaran (expenditure pattern) atau pola konsumsi dari pada masyarakat adalah berlainan di setiap daerah;
2. tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang tidak sama di setiap daerah. Umpamanya, di daerah A konsumsi bahan pakaian rata-rata adalah lebih tinggi dari pada di daerah B. Dalam hal ini maka industri bahan pakaian di daerah A dapat mempunyai location quotient lebih besar dari pada satu, tetapi daerah ini mengimpor hasil produksinya, sedang dilain pihak, di daerah

B industri tersebut mempunyai location quotient kurang dari satu , tetapi daerah B mengekspor hasil produksinya.

- Keperluan-keperluan untuk produksi, dan juga produktifitas buruh berbeda di antara daerah. Umpamanya, industri pertenunan di daerah A rata-rata lebih banyak memakai benang tenun kapas, sedang di daerah Blebih banyak di pakai benang tenun sintesis. Dalam hal ini maka industri pemintalan kapas di daerah Adapat mempunyai location quotient lebih besar dari satu, tetapi daerah itu mengimpor benang tenun dari daerah B, di mana industri pemintalan kapasnya mempunyai location quotient kurang dari satu.

#### 2.2.4 Coefisient Resuffle (CR)

Analisis Coefient Resuffle sebenarnya merupakan turunan dari analisis Location Quatient. Koefisien pergeseran dapat dicari dari data yang sama untuk periode waktu yang berbeda. Dalam menghitung koefisien pergeseran ini kita mengabaikan berbagai perubahan pada beberapa perubah.

Koefisien pergeseran menyatakan besarnya redistribusi atau pergeseran dalam distribusi suatu sektor (sub sektor) suatu tahun dasar analisis dengan tahun akhir analisis. (Warpani,1984:84).

$$CR = \frac{\%(V_i^{R98} V^{R98} - V_i^{R94} V^{R94}) - \%(V_i^{n98} V^{n98} - V_i^{n94} V^{n94})}{100}$$

Kriteria :

CR < 0, berarti sektor / sub sektor i melemah

CR = 0, berarti sektor / sub sektor i tidak bergeser

CR > 0, berarti sektor / sub sektor i menguat



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif terhadap perekonomian perkembangan Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari pengaruh sektor basis terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif. (Supranta J, 1994:20)

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan mencatat data dari kantor statistik Jawa Timur, kantor statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat II Bojonegoro, dan studi pustaka.

#### 3.3 Metode Analisis

1. Untuk mengetahui sektor prioritas atau bukan digunakan metode Location Quotient (LQ) dengan rumus (Azis I.J, 1994:154) :

$$LQ_i^R = \frac{V_i^R / V^R}{V_i^n / V^n}$$

dimana :

$LQ_j^R$  = Koefisien LQ sektor i di daerah Bojonegoro

$V_i^R$  = Nilai tambah sektor i di daerah Bojonegoro

$V^R$  = Nilai tambah semua sektor di daerah Bojonegoro

$V_i^n$  = Nilai tambah sektor i di Jawa Timur

$V^n$  = Nilai tambah semua sektor di Jawa Timur

Kriteria :

$LQ = 1$ , maka sektor  $i$  hanya cukup untuk daerah sendiri

$LQ > 1$ , maka sektor  $i$  merupakan sektor kuat, sehingga daerah tersebut mampu mengekspor hasil produksi dari sektor  $i$

$LQ < 1$ , maka sektor  $i$  merupakan sektor lemah, sehingga daerah tersebut mengimpor hasil produksi sektor  $i$  dari daerah lain

2. Untuk mengetahui pergeseran suatu sektor ekonomi selama periode 1994-1998 digunakan rumus: (Warpani, 1984:84)

$$CR = \frac{\%(V_i^R 98 / V^R 98 - V_i^R 94 / V^R 94) - \%(V_i^n 98 / V^n 98 - V_i^n 94 / V^n 94)}{100}$$

Kriteria :

$CR < 0$ , berarti sektor / sub sektor  $i$  melemah

$CR = 0$ , berarti sektor / sub sektor  $i$  tidak bergeser

$CR > 0$ , berarti sektor / sub sektor  $i$  menguat

### 3.4 Definisi Variabel Operasional

1. Analisis penentuan prioritas pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Bojonegoro, merupakan analisis tentang pemusatan atau prioritas terhadap sektor di Kabupaten Bojonegoro dianggap produktif yaitu mampu mendorong lahirnya usaha baru sehingga sektor tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut. Sektor tersebut lebih dikenal dengan sebutan sektor pemimpin.
2. PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi.

3. Sektor Penghasil Ekspor, merupakan sektor ekonomi Kabupaten Bojonegoro yang menghasilkan barang-barang ekspor, dan yang dimaksud ekspor disini meliputi ekspor keluar Kabupaten Bojonegoro atau luar propinsi dan keluar negeri.
4. Location Quatient adalah suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain.
5. Coefisien Resuffle adalah koefisien yang menyatakan besarnya redistribusi atau pergeseran dalam distribusi suatu sektor (sub-sektor) suatu tahun dasar analisis dengan tahun akhir analisis.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum

#### 4.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah tingkat II di propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada posisi  $111,25^{\circ}$  -  $112,09^{\circ}$  bujur timur dan  $6,59^{\circ}$  -  $7,37^{\circ}$  lintang selatan. Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi dengan batas-batas wilayah administrasinya sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tuban
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan

Wilayah yang merupakan dataran rendah umumnya terdapat di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, sedangkan di belahan Bojonegoro bagian selatan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian tempat 11m sampai dengan 920m di atas permukaan air laut dengan puncaknya Gunung Gede. Wilayah kabupaten ini dilalui Sungai Bengawan Solo yang berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah dan mengalir ke arah timur melintasi wilayah bagian utara. Aliran Sungai Bengawan Solo yang melintasi wilayah tersebut merupakan tempat bermuaranya sungai-sungai yang ada di daerah tersebut yang berjumlah 19 sungai. Aliran sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang berada di sekitarnya.

Ditinjau dari letak geografis yang ada, daerah ini mempunyai posisi yang menguntungkan. Hal ini disebabkan karena keadaan iklim dan letaknya yang strategis, sehingga memungkinkan terciptanya hubungan yang baik dengan

daerah-daerah di sekitarnya. Posisi yang demikian ini memberikan kedudukan dan peranan yang strategis kepada pemerintah daerah untuk menata rumah tangganya dalam melaksanakan pembangunan.

#### 4.1.2 Keadaan Penduduk

##### 4.1.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro menurut data kantor statistik Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1998 sebesar 1.170.645 jiwa. Pertumbuhan Penduduk Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 1994 - 1998

Tahun	Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1994	1.128.028	—
1995	1.132.263	0,38
1996	1.163.271	2,74
1997	1.167.586	0,37
1998	1.170.645	0,26

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat Bojonegoro, 1999:24.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro mempunyai rata-rata pertumbuhan penduduk mulai tahun 1994 sampai tahun 1998 sebesar 0,94% pertahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 1996 yaitu 2,74% dan terendah 0,26% yang terjadi pada tahun 1998. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang kecil ini dapat diakibatkan karena keberhasilan program KB, migrasi penduduk yang berfluktuasi. Di samping itu laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh empat hal, yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), imigrasi (migrasi masuk), emigrasi (migrasi keluar).

##### 4.1.2.2 Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro pada akhir tahun 1998 meningkat dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1997 yaitu naik

0,11% menjadi 1.170.645 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 49,60% adalah penduduk laki-laki dan selebihnya sebanyak 50,40% adalah penduduk perempuan. Sejalan dengan berjalannya penduduk maka kepadatan bertambah dari 489 jiwa/km<sup>2</sup> pada akhir tahun 1994 menjadi 507 jiwa/km<sup>2</sup> pada akhir tahun 1998.

Tingkat kepadatan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro berbeda satu sama lain. Perbedaan ini bisa disebabkan karena adanya laju pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah tersebut berbeda, di samping disebabkan pula oleh adanya perpindahan penduduk dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Perpindahan penduduk ini dapat disebabkan oleh karena adanya daya tarik daerah tujuan yang berupa laju pembangunan yang cukup tinggi, luasnya lapangan kerja yang tersedia, besarnya pendapatan yang diterima, adanya jaminan keamanan, tersedianya berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan adanya daya tarik tersebut menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di masing-masing daerah berbeda. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Bojonegoro dengan kepadatan penduduk sebanyak 2.853 jiwa per km<sup>2</sup>, berikutnya adalah Kecamatan Bourena dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.083 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Kecamatan Margomulya sebanyak 151 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bubulan sebanyak 181 jiwa per km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelas mengetahui tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro pada tahun 1998, maka dapat dilihat pada tabel 2 (BPS, Kabupaten Bojonegoro, 1999:23).

Tabel 2: Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998

No	Kecamatan	Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Ranking
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Ngraho	20.253	21.028	41.281	578	11
2.	Margomulyo	10.192	10.845	21.037	151	23
3.	Tambakrejo	25.369	25.859	51.228	244	20
4.	Ngambon	18.023	18.446	36.469	204	21
5.	Bubulan	8.577	17.859	35.312	184	22
6.	Temayang	7.826	16.788	33.350	268	19
7.	Sugihwaras	90.351	21.822	43.338	497	14
8.	Kedungadem	18.186	39.126	78.104	526	13
9.	Kepohbaru	30.829	30.566	61.395	771	9
10.	Boureno	16.259	36.137	71.907	1.083	2
11.	Kanor	13.422	28.168	55.785	933	5
12.	Sumberrejo	16.076	33.058	65.872	860	8
13.	Balen	14.304	30.145	59.915	990	3
14.	Kapas	41.896	41.226	83.122	886	7
15.	Bojonegoro	35.789	37.572	73.361	2.853	1
16.	Trucuk	16.510	17.156	33.666	917	6
17.	Dander	32.722	32.542	65.264	551	12
18.	Ngasem	34.932	34.660	69.592	386	17
19.	Kalitidu	28.534	28.349	56.883	685	10
20.	Malo	14.232	14.741	28.973	443	15
21.	Purwosari	13.170	13.719	26.889	432	16
22.	Padangan	19.484	21.194	40.678	968	4
23.	Kasiman	18.236	18.988	3224	344	18
Jumlah		580.651	589.994	1.170.645	507	

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Bojonegoro, 1999:23.

#### 4.1.2.3 Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Distribusi penduduk dapat digolongkan dalam berbagai macam, tergantung dari tujuan yang ingin diketahui. Salah satunya adanya distribusi penduduk menurut lapangan usaha. Dengan melihat distribusi ini akan diketahui sumber penghasilan dan kemampuan lapangan kerja tersebut dalam menyerap tenaga kerja.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro pada tahun 1998 bekerja di bidang pertanian yakni sebesar 284.499 jiwa, hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Tabel 3 memperlihatkan keadaan tersebut.

Tabel 3: Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998

No	Lapangan Usaha	Penduduk	Persentase
1.	Pertanian	284.499	49,01
2.	Pertambangan	1.858	0,32
3.	Industri	35.990	6,20
4.	Listrik	7.837	1,35
5.	Konstruksi	72.561	12,50
6.	Perdagangan	98.509	16,97
7.	Perhubungan	8.1127	1,40
8.	Keuangan	4.354	0,75
9.	Jasa dan lainnya	66.756	11,5
	Jumlah	580.491	100,00

Sumber: Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, 1999:26.

#### 4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dapat di gambarkan dengan menunjukkan adanya distribusi mata pencaharian, distribusi PDRB menurut sektor dan perkembangan ekonomi sektoral. Setelah melihat bagaimana keadaan sosial ekonominya tentu akan lebih mudah bagi pemerintah daerah untuk mengetahui potensi-potensi daerah yang dimiliki guna dikembangkan sehingga pemerintah daerah mampu membuat strategi pemerintah daerah yang tepat.

##### 4.1.3.1 Distribusi PDRB Menurut Sektor

Melihat sumbernya PDRB dihasilkan dari *Value Added* tiap-tiap sektor atau sub sektor, yang mana dari informasi ini dapat diketahui struktur perekonomian suatu daerah, apakah daerah itu daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa. Hal ini mempunyai arti sendiri bagi perencanaan pemerintah daerah.



Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro kegiatan ekonomi banyak terpusat pada kegiatan di sektor pertanian, dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, yaitu sebesar Rp 441.246,60 juta pada tahun 1998, kemudian berikutnya disusul oleh sektor jasa-jasa sebesar Rp 146.172,52 juta. Selanjutnya untuk mengetahui distribusi semua sektor terhadap PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4: Distribusi PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 – 1998

No	Sektor	1994	1995	1996	1997	1998
1.	Pertanian	374.542,24	396.846,70	421.981,78	445.892,48	441.246,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.267,19	2.642,23	2.795,70	3.052,12	2.276,80
3.	Industri Pengolahan	90.903,71	84.207,10	87.320,07	88.732,80	76.390,52
4.	Listrik, gas dan air bersih	4.314,49	3.595,63	4.364,00	4.932,72	5.001,26
5.	Konstruksi	30.031,47	41.803,45	45.342,77	48.910,87	40.955,74
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	107.928,26	135.416,92	143.001,59	150.633,46	140.044,04
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	43.616,19	64.874,93	76.480,80	80.614,79	65.607,79
8.	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	56.513,95	44.833,81	54.651,00	62.161,52	61.069,01
9.	Jasa-jasa	154.895,14	143.936,77	146.484,35	148.025,13	146.172,52
	PDRB	865.012,64	918.157,54	982.422,06	1.032.955,89	978.764,28

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Bojonegoro, 1999:62.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro

Untuk mengetahui potensi sektor ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, maka digunakan data PDRB atas dasar harga konstan 1993 menurut lapangan usaha pada tahun 1994 – 1998. Pendekatan yang digunakan adalah metode Location Quation (LQ) yang membandingkan besarnya PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dengan PDRB Propinsi Jawa Timur. Teknik analisis LQ merupakan cara permulaan untuk mengetahui kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain yang lebih luas. Tahap pertama teknik ini sudah cukup memberikan gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dengan sektor yang diamati. Dalam literatur pembangunan daerah disebutkan bahwa suatu sektor di sebuah daerah yang mempunyai LQ di atas 1 (satu) merupakan sektor basis, sehingga daerah yang bersangkutan secara potensial merupakan pengekspor produk dari sektor tersebut ke daerah lain. Sebaliknya suatu daerah merupakan pengimpor produk sektor tertentu kalau nilai LQ-nya di bawah 1(satu). Asumsi dari penggunaan analisis LQ ini adalah penggunaan teknologi, selera, dan pola konsumsi tiap daerah yang dianggap sama (Azis,1994:23).

Berdasarkan hasil perhitungan LQ terhadap 9 (sembilan) sektor ekonomi yang ada pada lampiran 5, jumlah sektor basis atau sektor yang berpotensi pada tahun 1994 sebanyak 2 (dua) sektor yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa, pada tahun 1995 – 1998 jumlah sektor yang berpotensi berubah menjadi 3 (tiga) sektor yaitu pada tahun 1995 – 1997 terdiri dari sektor pertanian, pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa, sedangkan pada tahun 1998 terdiri atas sektor sektor pertanian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Keadaan ini lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5: Kelompok Sektor Berpotensi Yang Terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 – 1998

No	Sektor	LQ				
		1994	1995	1996	1997	1998
1.	Pertanian	2,36194	2,49881	2,58691	2,70199	2,50219
2.	Jasa-jasa	1,59642	1,46555	1,46115	1,43343	1,31879
3.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,75854	1,06064	1,15419	1,19473	0,88982
4.	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	0,96656	0,73951	0,86315	0,94134	1,01069

Sumber: Lampiran 5 diolah

Kelompok sektor berpotensi merupakan sektor-sektor basis yang memiliki nilai  $LQ > 1$ , hal ini berarti pada sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor non basis baik dalam daerah penelitian ataupun dibandingkan dengan daerah lain yang lebih luas yaitu Propinsi Jawa Timur.

#### 4.2.1.1 Sektor Pertanian

Selama periode analisis tahun 1994 –1998 perolehan nilai LQ sektor pertanian lebih besar dari satu dan paling tinggi di antara sektor-sektor ekonomi lainnya (lihat tabel 5), hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah khususnya peningkatan pendapatan regional. Berdasarkan perhitungan pada tabel 5 menghasilkan bahwa sektor pertanian selama tahun 1994-1998 perolehan nilai LQ yaitu berturut-turut sebesar 2,36194 ; 2,49881; 2,58691; 2,70199; dan 2,50219.

Sejak tahun 1994 sektor pertanian menduduki urutan teratas dalam perolehan nilai LQ dibandingkan dengan 3(tiga) sektor berpotensi lainnya. Sampai tahun 1998 sektor pertanian tetap memimpin dalam perolehan nilai LQ

atau dengan kata lain tidak ada sektor lain yang mampu menyamai nilai LQ dari sektor ini. Sektor pertanian dengan demikian tetap diprioritaskan pengembangannya guna menunjang perkembangan sektor-sektor lain yang pada akhirnya berimplikasi pada kemajuan perekonomian daerah.

Besarnya nilai LQ yang diperoleh menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro lebih baik daripada peranan sektor pertanian di Propinsi Jawa Timur. Peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terlihat pada lampiran 3. Pada lampiran itu dapat dikemukakan bahwa secara proporsional PDRB sektor pertanian selain terbesar juga mengalami kenaikan sebesar 1,78% pada tahun 1998 yang menyumbang sebesar 45,08% dibandingkan dengan tahun 1994 yang menyumbang sebesar 43,29%. Sementara pada periode tahun yang sama di tingkat Propinsi Jawa Timur peranan sektor pertanian di dalam menyumbang PDRB lebih kecil, yakni sebesar 18,33% pada tahun 1994 dan mengalami penurunan sebesar 0,31% pada tahun 1998 sehingga menjadi 18,02% (lihat lampiran 4). Berdasarkan angka-angka tersebut jelas diketahui bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling besar memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dari 9 (sembilan) sektor yang ada. Keberhasilan Bojonegoro dalam mencapai pertumbuhan sektor pertanian sebesar tersebut disebabkan oleh kesungguhan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dalam melaksanakan pembangunan terutama di dalam meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor non-migas. Keberhasilan sektor pertanian tersebut didukung oleh sub sektor yang ada di dalamnya. Sub sektor Kehutanan menyumbang paling besar terhadap sektor ini dimana nilai LQ dari tahun 1994 sampai tahun 1998 lebih dari satu. Sub sektor Tanaman Bahan Makanan merupakan sub sektor kedua yang menyumbang paling besar pada sektor pertanian dan yang ketiga adalah sub sektor Peternakan. Sedangkan sub sektor Tanaman Perkebunan dan

sub sektor Perikanan selama periode analisis belum mampu berperan karena nilai LQ-nya kurang dari satu, maka dari itu sub sektor ini perlu dikembangkan agar bisa mendukung sektor Pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6: Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 1994 – 1998 Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993.

No	Sub Sektor	1994	1995	1996	1997	1998
1.	Tanaman Bahan Makanan	3,13681	3,15201	3,22749	3,48437	3,12746
2.	Tanaman Perkebunan	0,73875	0,84952	0,88034	0,93166	0,80618
3.	Peternakan	1,43104	1,86358	2,16995	2,07115	1,98785
4.	Kehutanan	4,05545	5,06508	5,29930	5,58145	5,24476
5.	Perikanan	0,08813	0,17075	0,29570	0,28724	0,22274

Sumber Data : Lampiran 6,7,8,9,10, diolah.

#### 4.2.1.2 Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang perolehan nilai LQ-nya berada pada peringkat terbesar kedua setelah sektor pertanian. Hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 1994 nilai LQ sektor ini sebesar 1,59642; pada tahun 1995 sebesar 1,46555; pada tahun 1996 sebesar 1,46115; pada tahun 1997 sebesar 1,43343 dan sebesar 1,31879 pada tahun 1998.

Jika diamati secara seksama dari perolehan nilai LQ-nya maka selama tahun 1994 – 1998 sektor jasa-jasa mampu memperoleh nilai  $LQ > 1$ , maka itu peranan sektor jasa-jasa dalam menyumbang PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro relatif lebih besar jika dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di tingkat Propinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang sebesar 17,91% pada tahun 1994 dan 14,93% pada tahun 1998 (lampiran 3), dibandingkan dengan sumbangan sektor jasa-jasa di Propinsi Jawa Timur yang lebih kecil, yakni sebesar 11,22% pada tahun 1994 dan 11,32% pada tahun 1998 (lampiran 4).

Sesuai dengan perolehan nilai LQ pada tahun 1998, sektor jasa-jasa dapat dijadikan sebagai prioritas kedua setelah sektor pertanian bagi pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. Sektor ini menjadi penunjang bagi

sektor pertanian untuk mendorong pengembangan pembangunan pada sektor-sektor lainnya. Keberhasilan sektor Jasa-jasa ini tidak terlepas dari peranan sub-sub sektor yang dapat di lihat pada tabel 7.

Tabel 7: Hasil Perhitungan LQ Sektor Jasa-Jasa Pada Tahun 1994 – 1998 Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Bojonegoro

No	Sub Sektor	1994	1995	1996	1997	1998
a.	Pemerintah Umum	2,11864	2,02733	2,04654	2,04942	1,88104
b.	Swasta	1,10360	0,95634	0,95126	0,91843	0,82482
	1. Jasa sosial kemasyarakatan	1,34108	1,15091	1,15890	1,07834	1,33765
	2. Jasa hiburan dan kebudayaan	0,20370	0,14545	0,14545	0,13793	0,14815
	3. Jasa perorangan	1,04266	0,90926	0,90238	0,88123	0,69895

Sumber Data: Lampiran 6,7,8,9,10, diolah.

Tabel 7 menunjukkan peranan masing-masing sub sektor dari sektor Jasa-jasa berdasarkan nilai LQ-nya. Sub Sektor Pemerintah Umum merupakan sub sektor yang paling besar sumbangannya dengan perolehan nilai LQ lebih besar dari satu selama tahun 1994 – 1998. Setelah Sub Sektor Pemerintah Umum yang menjadi penyumbang kedua terbesar pada Sektor Jasa-jasa ini adalah Sub Sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan. Sub Sektor Swasta mampu menjadi penyumbang hanya pada tahun 1994 , begitu juga dengan Sub Sektor Jasa Perorangan yang juga hanya mampu menyumbang pada tahun 1994. Sedangkan Sub Sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan masih belum mampu memberikan sumbangan maka perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar sub sektor ini pada masa yang akan datang bisa ikut berperan menjadi penyumbang.

#### 4.2.1.3 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang perolehan nilai LQ-nya berada pada peringkat ke tiga setelah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 1994 nilai LQ sektor ini sebesar 0,75854; pada tahun 1995 sebesar 1,06064; pada tahun 1996 sebesar 1,15419; pada tahun 1997 sebesar 1,19473 dan sebesar 0,88982 pada tahun 1998.

Dari hasil perolehan nilai LQ-nya maka pada tahun 1994 dan tahun 1998 sektor pengangkutan dan komunikasi tidak memiliki kemampuan atau potensi sebagai sektor basis karena perolehan nilai LQ-nya kurang dari 1 (satu). Pada tahun 1994 perolehan nilai LQ sektor ini sebesar 0,75854 yang berarti sektor pengangkutan dan komunikasi hanya mampu melayani kebutuhan pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sendiri sebesar 76% dan sisanya 24% dipenuhi dengan mengimpor dari daerah lain. Sedangkan pada tahun 1998 nilai LQ sektor pengangkutan dan jasa sebesar 0,8898, hal ini menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi mampu melayani kebutuhan pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sendiri sebesar 89% dan sisanya sebesar 11% mengimpor dari daerah lain. Keadaan ini dapat diartikan bahwa peranan sektor jasa-jasa dalam pembentukan PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro lebih kecil jika dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di Propinsi Jawa Timur.

Jika pada tahun 1995, 1996 dan 1997 sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sempat menjadi sektor basis, itu berarti peranan sektor pengangkutan dan komunikasi dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro relatif lebih besar jika dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di tingkat Propinsi Jawa Timur. Keberhasilan sektor ini tentu saja didukung oleh sumbangan masing-masing sub sektor yang ada di dalamnya. Peranan masing-masing sub sektor ini dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8: Perhitungan LQ Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Pada Tahun 1994-1998 di Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993.

No	Sub Sektor	1994	1995	1996	1997	1998
a.	Pengangkutan	0,84225	1,18456	1,35291	1,43572	1,10196
	1. Angkutan Rel	7,67692	16,68657	18,21875	18,14062	9,18367
	2. Angkutan Jalan Raya	1,22774	1,59567	1,85927	2,04260	1,62430
	6. Jasa Penumpang Angkutan	0,00916	0,02195	0,02429	0,02396	0,01804
b.	Komunikasi	0,15828	0,26309	0,19672	0,18442	0,14958
	1. Pos dan Telekomunikasi	0,14214	0,20278	0,15308	0,14561	0,12000
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,85000	1,79412	1,05357	0,92063	0,60194

Sumber Data : Lampiran 6,7,8,9,10, diolah.

Sub Sektor pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1(satu) pada tahun 1994 terdapat 2(dua) sub sektor basis yaitu sub sektor Angkutan Rel dan sub sektor Angkutan Jalan Raya. Pada tahun 1995 dan tahun 1996 terdapat 4(empat) sub sektor yaitu sub sektor Pengangkutan, sub sektor Angkutan Rel, sub sektor Jalan Raya dan sub sektor Jasa Penunjang Komunikasi. Sedangkan pada tahun 1997 dan tahun 1998 terdapat 3(tiga) sub sektor yang nilai LQ-nya lebih besar dari 1(satu) yaitu sub sektor Pengangkutan, sub sektor Angkutan Rel dan sub sektor Angkutan Jalan Raya. Sub-sub sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1(satu) tersebut menunjukkan bahwa sub sektor tersebut telah mampu berkiprah untuk keberhasilan pembangunan. Untuk sub sektor lainnya yang belum mampu menjadi peryumbang sektor Pengangkutan dan Komunikasi diharapkan dapat meningkatkan peranannya pada masa yang akan datang dengan memberikan perhatian pada sub sektor tersebut oleh pemerintah daerah setempat untuk mengembangkannya.

#### 4.2.1.4 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Dari hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (tabel 5) pada tahun 1994 sampai tahun 1997 bukanlah merupakan sektor yang potensial sebagai sektor basis, karena perolehan nilai LQ-nya di bawah 1(satu). Secara berturut-turut perolehan nilai LQ sektor ini selama tahun 1994 sampai tahun 1997 adalah sebesar 0,96656; 0,73951; 0,86315 dan 0,94134.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan pada tahun 1994 – 1997 tidak mempunyai keunggulan komparatif terhadap sektor-sektor lainnya baik di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro maupun dalam lingkup Propinsi Jawa Timur. Angka-angka tersebut mempunyai arti bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dalam kegiatan di sektor ekonomi di sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan mempunyai kecenderungan untuk mengimpor dari





daerah lain. Tetapi pada tahun 1998 sektor ini mampu menjadi sektor yang berpotensi karena mempunyai nilai LQ sebesar 1,01069. Artinya peranan sektor ini lebih baik dibandingkan dengan sektor-sektor non basis maupun dengan sektor yang sama di Propinsi Jawa Timur, dimana sektor ini menyumbang sebesar 6,24% terhadap total PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, sedangkan di Propinsi Jawa Timur sektor ini hanya menyumbang sebesar 6,17% terhadap total PDRB Propinsi Jawa Timur. Keberhasilan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sangat ditentukan oleh sumbangan masing-masing sub sektornya. Sub Sektor dari Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sumbangannya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 : Perhitungan LQ Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan pada Tahun 1994-1998 Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Bojonegoro

No	Sub Sektor	1994	1995	1996	1997	1998
1.	Bank	0,55312	0,50992	0,51087	0,50161	0,57594
2.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,93392	0,58958	0,83653	0,91321	1,09469
4.	Sewa Bangunan	2,12867	1,57336	1,91104	2,16201	2,12949
5.	Jasa Perusahaan	0,09439	0,07793	0,08492	0,08115	0,07881

Sumber Data : Lampiran 6,7 8,9,10, diolah.

Sub Sektor yang paling berperan dalam menyumbang sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan adalah sub sektor Sewa Bangunan yang memiliki nilai LQ pada tahun 1994-1998 lebih besar dari 1(satu). Sedangkan sub sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank hanya mampu berperan pada tahun 1998 dengan nilai LQ sebesar 1,09469. Sub sektor lainnya masih belum mampu berperan dalam pembangunan karena nilai LQ-nya lebih kecil dari 1(satu), maka sub-sub sektor ini harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah agar dimasa datang bisa ikut berperan dalam pembangunan.

#### 4.2.2 Analisis Potensi Mobilitas Sektoral

Untuk melihat potensi mobilitas sektoral pada penelitian ini digunakan pendekatan analisis koefisien pergeseran (Coefficient Resuffle=CR). Untuk

mengetahui besarnya pergeseran secara sektoral dipergunakan data PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dan Propinsi Jawa Timur dalam bentuk yang sama pada tahun 1994 dibandingkan dengan tahun 1998. Kegunaan koefisien pergeseran adalah untuk mengetahui besarnya redistribusi atau pergeseran di dalam distribusi lokasi pada tahun 1994 dibandingkan dengan tahun 1998, apakah semakin menguat atau semakin melemah. Bila CR bernilai positif berarti sektor tersebut menguat sebaliknya jika bernilai negatif berarti sektor tersebut melemah.

Besarnya koefisien pergeseran PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro atas PDRB Propinsi Jawa Timur menurut sektor atas dasar harga konstan tahun 1993 pada tahun 1994 – 1998 ditunjukkan oleh tabel 10.

Tabel 10: Hasil Perhitungan Coefisient Resuffle PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Atas PDRB Propinsi Jawa Timur ADH Konstan 1993 Menurut Sektor Tahun 1994 - 1998

No	Sektor	CR
1.	Pertanian	0,0210
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,0086
3.	Industri Pengolahan	-0,0368
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	-0,0067
5.	Konstruksi	0,0183
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,0155
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,0078
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,0030
9.	Jasa -jasa	-0,0308

Sumber: Lampiran 11, diolah.

Tabel 10 menunjukkan bahwa koefisien pergeseran (CR) PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro atas PDRB Propinsi Jawa Timur ( atas dasar harga konstan 1993) menurut sektor pada tahun 1994 – 1998 yang mempunyai nilai koefisien pergeseran (CR) positif adalah sektor pertanian sebesar 0,0210; sektor konstruksi sebesar 0,0183; sektor perdagangan , hotel dan restoran sebesar 0,0155; sektor pertambangan dan pengggalian sebesar 0,0086; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,0078; serta sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan sebesar 0,0030. Perolehan nilai CR positif ini mengandung arti bahwa sektor pertanian; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami pergeseran di dalam distribusi PDRB yang semakin menguat. Sementara sektor-sektor yang mempunyai koefisien pergeseran negatif adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar  $-0,0067$ ; diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar  $-0,0308$  dan terakhir sektor industri pengolahan sebesar  $-0,0368$ . Sektor-sektor yang memiliki nilai CR negatif tersebut merupakan sektor-sektor yang mengalami pergeseran atau redistribusi yang semakin melemah pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1998.

#### 4.2.2.1 Sektor Pertanian

Sektor Pertanian merupakan sektor yang memiliki pergeseran yang menguat selama tahun analisis karena sektor ini memiliki nilai CR lebih dari 0(nol). Hasil perhitungan CR sub sektor pendukung dari sektor Pertanian ini dapat di lihat pada tabel 11.

Tabel 11: Hasil Perhitungan CR Sub Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 1998

No	Sub Sektor	CR
1.	Tanaman Bahan Makanan	0,0062
2.	Tanaman Perkebunan	0,0026
3.	Peternakan	0,0093
4.	Kehutanan	0,0017
5.	Perikanan	0,0022

Sumber Data: Lampiran 11, diolah.

Tabel 11 menunjukkan hasil perhitungan nilai CR Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 bahwa semua sub sektor Pertanian memiliki nilai CR positif, hal ini menunjukkan bahwa sub-sub sektor ini memiliki kecenderungan



menguat sehingga pemerintah daerah setempat perlu memperhatikan kelima sub sektor tersebut.

#### 4.2.2.2 Sektor Konstruksi

Perolehan nilai CR yang positif pada sektor Konstruksi yaitu sebesar 0,0183 menunjukkan bahwa sektor Konstruksi memiliki kecenderungan menguat selama periode analisis.

#### 4.2.2.3 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pada perekonomian di Bojonegoro yang memiliki nilai CR positif ketiga adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 0,0155. Nilai CR yang positif ini menunjukkan bahwa sektor ini mengalami pergeseran yang menguat selama periode analisis. Hasil perhitungan sub sektor pendukung sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12: Hasil Perhitungan CR Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998.

No	Sub Sektor	CR
1.	Perdagangan	0,0158
2.	Hotel	-0,0004
3.	Restoran	0,0001

Sumber Data: Lampiran 11, diolah.

Pada Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terdapat 2 sub sektor yang memiliki nilai CR positif yaitu sub sektor Perdagangan sebesar 0,0158 dan sub sektor Restoran sebesar 0,0001. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor ini mengalami pergeseran yang menguat selama periode analisis. Sedangkan sub sektor Hotel memiliki nilai CR yang negatif yang berarti melemah selama periode analisis.

#### 4.2.2.4 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang menguat keempat dengan perolehan nilai CR sebesar 0,0086. Menguatnya sektor ini tidak terlepas dari peranan sub sektor yang mendukung di dalamnya. Hasil perhitungan CR menunjukkan bahwa hanya sub sektor Penggalian yang bisa mendukung sektor ini dengan perolehan CR sebesar 0,0110.

#### 4.2.2.5 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Nilai CR yang diperoleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 0,0078. Nilai positif ini menunjukkan menguatnya sektor ini selama periode analisis. Pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi terdapat 3 sub sektor yang memiliki nilai CR positif yaitu sub sektor Pengangkutan, sub sektor Angkutan Rel dan sub sektor Angkutan Jalan Raya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 13.

Tabel 13: Hasil Perhitungan CR Sub Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998.

No	Sub Sektor	CR
a.	Pengangkutan	0,0151
	1. Angkutan Rel	0,0039
	2. Angkutan Jalan Raya	0,0132
	6. Jasa Penumpang Angkutan	-0,0011
b.	Komunikasi	-0,0074
	1. Pos dan Telekomunikasi	-0,0071
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	-0,0004

Sumber Data: Lampiran 11, diolah.

#### 4.2.2.6 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Angka CR yang diperoleh sektor ini adalah 0,0030 dan merupakan nilai terkecil jika dibandingkan sektor lainnya namun dengan nilai positif sektor ini tetap mengalami pergeseran yang menguat. Sub Sektor yang memiliki nilai positif adalah sub sektor Bank, sub sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank dan sub

sektor Sewa Bangunan. Sedangkan sub sektor lainnya masih bernilai negatif yang berarti mengalami pergeseran yang melemah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 14.

Tabel 14: Hasil Perhitungan CR Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 1998

No	Sub Sektor	CR
1.	Bank	0,0034
2.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,0012
4.	Sewa Bangunan	0,0002
5.	Jasa Perusahaan	-0,0019

Sumber Data: Lampiran 11, diolah.

#### 4.3 Pembahasan

Keberhasilan kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tercermin dalam pertumbuhan ekonomi regional tahun 1998 yang mencapai 5,25% berdasarkan atas dasar harga konstan 1993. Perencanaan Pembangunan daerah perlu dilakukan oleh suatu daerah oleh karena adanya keterbatasan sumber dana yang tersedia bagi pembangunan, sedangkan di sisi lain banyak target atau tujuan pembangunan yang harus dicapai.

Perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan atas dasar pemilihan sektor-sektor ekonomi daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pemilihan atau identifikasi potensi setiap sektor ini berguna untuk mengetahui keunggulan komparatif dan kompetitif suatu sektor. Setelah diketahui potensi masing-masing sektor yakni kekuatan dan kelemahannya maka dapat ditentukan sektor manakah yang patut menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan. Pemilihan prioritas ini dapat dilakukan dengan metode location quotient (LQ).

Berdasarkan hasil analisis potensi sektor ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro bahwa hanya terdapat empat sektor yang berpotensi sebagai sektor basis yang memiliki nilai  $LQ > 1$ . Keempat sektor tersebut berdasarkan urutannya adalah sektor pertanian; sektor jasa-jasa; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dari keempat sektor tersebut, sektor pertanianlah yang paling besar dalam perolehan nilai LQ-nya. Sektor jasa-jasa potensinya sebagai sektor basis relatif lebih kecil karena perolehan nilai LQ tiap tahunnya maupun nilai LQ rata-ratanya lebih kecil dari nilai LQ sektor pertanian. Dengan nilai LQ rata-rata pertahun pada kurun 1994 – 1998 sebesar 1,46 maka kemampuan untuk mengeksport hasil kegiatan ekonomi di sektor ini ke daerah lain hanya sebesar 46% saja. Dibandingkan dengan sektor pertanian angka ini relatif sangat kecil dengan nilai LQ rata-rata sektor pertanian selama 5 tahun (1994 – 1998) sebesar



2,53, maka berarti sektor pertanian selain mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri sektor ini juga mampu mengeksport hasil produksi pertanian ke daerah lain sebesar 153% dari hasil produksinya. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi bila dilihat dari hasil perhitungan nilai LQ maka sektor ini hanya mampu menjadi sektor basis ketiga setelah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa dengan perolehan nilai LQ rata-rata sebesar 1,01. Pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan hanya mampu menjadi sektor basis pada tahun 1998 yaitu dengan nilai LQ sebesar 1,01. Apabila dilihat dari nilai LQ rata-ratanya sektor ini bukanlah merupakan sektor basis karena nilai LQ rata-ratanya hanya sebesar 0,90, artinya sektor ini tidak dapat dijadikan sebagai *leading sector* dibandingkan dengan sektor pertanian dan sektor jasa-jasa.

Analisis sub sektor pendukung dari sektor yang diteliti selama tahun 1994-1998 atas dasar harga konstan tahun 1993 menunjukkan bahwa pada tahun 1998 sektor Pertanian memiliki 3 sub sektor basis yaitu sub sektor Tanaman Bahan Makanan, sub sektor Peternakan dan sub sektor Kehutanan. Pada sektor Jasa-jasa hanya memiliki 2 sub sektor basis yaitu sub sektor Pemerintah Umum dan sub sektor Jasa Sosial Masyarakat. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi memiliki 3 sub sektor basis yaitu sub sektor Pengangkutan, sub sektor Angkutan Rel dan sub sektor Angkutan Jalan Raya. Sedangkan pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan hanya terdapat 2 sub sektor basis yaitu sub sektor Lembaga Keuangan Non Bank dan sub sektor Sewa Bangunan.

Pada perhitungan koefisien resuffle (CR) yang dilakukan menunjukkan bahwa sektor pertanian juga memperoleh nilai positif yang paling besar diantara sembilan sektor ekonomi yang ada. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian mengalami kecenderungan menguat pada pada jangka waktu tahun 1994 – 1998. Sektor kedua yang menguat setelah sektor pertanian adalah sektor konstruksi dengan nilai CR sebesar 0,0183. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor ketiga yang menguat yang mempunyai nilai CR sebesar 0,0155.



Sedangkan sektor-sektor yang mengalami kecenderungan yang melemah pada jangka waktu tahun 1994 – 1998 adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai CR sebesar  $-0,0067$ ; kemudian sektor jasa-jasa dengan nilai CR sebesar  $-0,0308$ ; serta sektor industri pengolahan dengan nilai CR sebesar  $-0,0368$ .

Sub sektor pendukung yang mengalami pergeseran yang menguat dengan nilai CR positif pada sektor pertanian adalah sub sektor Tanaman Bahan Makanan, sub sektor Tanaman Perkebunan, sub sektor Peternakan, sub sektor Kehutanan dan sub sektor Perikanan. Pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terdapat 2 sub sektor yang memiliki pergeseran yang menguat yaitu sub sektor Perdagangan dan sub sektor Restoran dimana masing-masing memiliki nilai CR sebesar  $0,0158$  dan  $0,0001$ . Sektor Pertambangan dan Penggalian hanya memiliki 1(satu) sub sektor yang memiliki nilai CR positif yaitu sub sektor Penggalian dengan nilai CR  $0,0110$ . Pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi terdapat 3 sub sektor pendukung yang memiliki nilai CR positif yaitu sub sektor Pengangkutan, sub sektor Angkutan Rel dan sub sektor Angkutan Jalan Raya. Sedangkan pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki 3 sub sektor yang menguat yaitu sub sektor Bank, sub sektor Lembaga Keuangan Non Bank dan Sewa Bangunan.

Besarnya nilai CR yang diperoleh sektor pertanian yakni sebesar  $0,0210$  merupakan nilai positif tertinggi diantara sembilan sektor yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan atau pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro belum seperti yang diharapkan oleh teori ekonomi pembangunan yaitu semakin menurunnya peranan sektor primer akan diimbangi oleh semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier.

Kecenderungan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi yang telah terjadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro selama tahun 1994 – 1998 adalah bahwa semakin meningkatnya peranan sektor primer yang diimbangi oleh

semakin meningkatnya peranan sektor tersier, dalam hal ini adalah sektor konstruksi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dari dua kriteria baik dari hasil analisis potensi sektor maupun dari hasil analisis potensi mobilitas sektoral dapat dikatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis yang paling berpotensi untuk diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, karena peranannya terhadap total PDRB paling besar. Hal ini terjadi karena ditunjang oleh potensi sumber daya alam daerah Kabupaten Bojonegoro yang subur. Dengan penetapan prioritas pembangunan pada sektor pertanian bukan sektor lainnya untuk dikembangkan. Sebaliknya dengan pemrioritasan sektor pertanian dalam pembangunan, diharapkan dapat memberikan *spread effect* terhadap sektor-sektor yang lain sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dicapai bersamaan dengan semakin berkurangnya kepincangan antar sektor maupun antar wilayah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal dalam penelitian, yaitu :

1. dengan menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ) guna mencari sektor yang menentukan prioritas pembangunan maka dapat diperoleh hasil bahwa dari sembilan sektor yang diteliti menunjukkan selama kurun waktu tahun 1994 –1998 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat empat sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif yang dapat dijadikan sebagai *leading sector* (sektor pemimpin) bagi pembangunan daerah penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 pada tahun 1994 – 1998 terdapat empat sektor basis yaitu : sektor pertanian; sektor jasa-jasa; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai LQ rata-rata secara berurutan sebesar 2,53048; 1,45307 dan 1,01158 . Sedangkan untuk sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan secara rata-rata belum bisa menjadi sektor basis karena nilai LQ-nya sebesar 0,90425. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan hanya mampu menjadi sektor basis pada tahun 1998 yaitu sebesar 1,01059.
2. sektor yang memiliki kecenderungan pergeseran yang semakin menguat akan memberikan sumbangan yang lebih besar bagi pengembangan PDRB suatu daerah, artinya bahwa sektor yang merupakan sektor basis mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu. Sektor yang mengalami kecenderungan menguat akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan sektor yang memiliki kecenderungan melemah. Menguatnya sektor ini menunjukkan semakin meningkatnya peranan suatu

sektor dalam membentuk PDRB. Untuk itu sektor yang memiliki kecenderungan menguat perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk dikembangkan. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro selama tahun 1994 – 1998 sektor yang memiliki kecenderungan menguat adalah sektor pertanian; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai CR secara berurutan adalah 0,0210; 0,0183; 0,0155; 0,0086; 0,0078 dan 0,0030.

## 5.2 Saran-saran

1. Perlunya dilakukan penetapan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya lebih terarah dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin di capai.
2. Mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional yang dapat dicapai dengan cara: menjadikan pembangunan daerah sebagai komplemen pembangunan nasional dengan jalan menyesuaikan arah pembangunan sektoral dengan potensi serta keuntungan komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, dan kedua perencanaan tersebut diatas harus saling mendukung dalam usaha mencapai tujuan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Dyah P, 1998, *Analisi Penentuan Prioritas Pembangunan Di Surabaya*, Hasil Skripsi, Universitas Jember.
- Azis Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE – UI, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, *Jawa Timur dalam Angka*, 1999, Surabaya.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, *Bojonegoro dalam Angka*, 1999, Bojonegoro.
- Budiharsono S, 1989, *Perencanaan Pembangunan Wilayah : Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya*, PAU Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- GBHN, Tap No IV / MPR / 1999, 1999-2004, Lintas Media, Jombang.
- Ibrahim M, 1997, *Analisi Penentuan Prioritas Pembangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo*, Hasil Skripsi, Universitas Jember.
- Kadariyah, 1982, *Ekonomi Perencanaan*, FE – UI, Jakarta.
- Nuryasman MN, 1996, *Analisis Wilayah dan Teori Pusat Pertumbuhan*, LP3ES, Jakarta.
- Perroux Francouis, 1964, " *Note On The Concept Of Growth Poles*", in David Lee, Mc.Kee, et all, *Regional Economics' Theory and Practive*, Free Press, New York.
- Supranta J, 1994, *Metodelogi Penelitian*, LP3ES, Jakarta.
- Warpani S, 1984, *Analisis Kota dan Daerah*, ITB, Bandung.
- Widodo D T, 1999, *Analisa Penentuan Sektor Prioritas di Daerah Tingkat I Jawa Timur*, Hasil Skripsi, Universitas Jember.

Lampiran 1: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 – 1998 (Juta Rupiah)

Sektor / Sub Sektor	1994	1995	1996	1997	1998
<b>1. Pertanian</b>	<b>374.542,24</b>	<b>396.846,70</b>	<b>421.981,78</b>	<b>445.892,48</b>	<b>441.246,60</b>
1.1 Tanaman Bahan Makanan	311.765,11	321.558,60	338.416,53	356.898,51	362.149,78
1.2 Tanaman Perkebunan	19.885,70	22.085,33	25.738,46	29.570,35	22.228,70
1.3 Peternakan	22.891,43	29.980,67	32.486,75	33.370,51	32.029,88
1.4 Kehutanan	18.978,65	21.435,56	22.436,35	23.001,68	22.022,40
1.5 Perikanan	1.021,35	1.786,54	2.903,69	3.051,43	2.815,84
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>2.267,19</b>	<b>2.642,23</b>	<b>2.795,70</b>	<b>3.052,12</b>	<b>2.276,80</b>
2.3 Penggalian	2.267,19	2.642,23	2.795,70	3.052,12	2.276,80
<b>3. Industri Pengolahan</b>	<b>90.903,71</b>	<b>84.207,10</b>	<b>87.320,07</b>	<b>88.732,80</b>	<b>76.390,52</b>
3.1 Makanan, Minuman dan Tembakau	19.892,92	19.125,52	19.192,83	19.520,95	13.582,19
3.2 Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	1.212,54	1.112,57	1.148,62	1.151,44	940,15
3.3 Industri Kayu dan Sejenisnya	35.323,00	33.976,34	34.780,33	34.909,09	31.002,39
3.4 Kertas, Percetakan dan Penerbitan	3.576,82	2.946,35	2.994,65	3.036,23	2.598,33
3.5 Kimia, Minyak Bumi, Karet dan Plastik	1.197,65	922,92	1.086,72	1.106,95	996,18
3.6 Barang Galian Non Logam	24.987,70	22.650,29	23.650,18	24.456,40	23.276,69
3.8 Barang dari Logam	1.847,23	1.125,68	1.476,82	1.480,41	1.320,15
3.9 Barang Lainnya	2.865,85	2.347,43	2.989,92	3.071,33	2.674,44
<b>4. Listrik, Gas dan Air Bersih</b>	<b>4.314,49</b>	<b>3.595,63</b>	<b>4.364,00</b>	<b>4.932,72</b>	<b>5.001,26</b>
4.1 Listrik	3.769,77	3.089,88	3.826,85	4.387,83	4.488,66
4.3 Air bersih	544,72	505,75	537,15	544,89	512,60
<b>5. Konstruksi</b>	<b>30.031,47</b>	<b>41.803,45</b>	<b>45.342,77</b>	<b>48.910,87</b>	<b>40.955,74</b>
<b>6. Perdagangan, Hotel dan Restoran</b>	<b>107.928,26</b>	<b>135.416,92</b>	<b>143.001,59</b>	<b>150.633,46</b>	<b>140.044,04</b>
6.1 Perdagangan	99.243,81	120.985,63	127.938,29	135.060,84	127.061,77
6.2 Hotel	325,35	519,51	566,77	577,12	497,02
6.3 Restoran	8.359,10	13.911,78	14.496,53	14.995,50	12.485,25
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>43.616,19</b>	<b>64.874,93</b>	<b>76.480,80</b>	<b>80.614,79</b>	<b>65.607,79</b>
a. Pengangkutan	42.492,55	62.704,74	74.236,24	78.218,39	63.150,38
1. Angkutan Rel	4.315,47	10.265,37	11.458,43	11.989,03	8.811,79
2. Angkutan Jalan Raya	38.053,88	52.141,96	62.432,61	65.875,31	54.040,15
6. Jasa Penumpang Angkutan	123,20	297,41	345,20	354,05	298,44
b. Komunikasi	1.123,64	2.170,19	2.244,56	2.396,40	2.457,41
1. Pos dan Telekomunikasi	978,59	1.609,11	1.669,17	1.797,32	1.849,55
2. Jasa Penunjang Komunikasi	145,05	561,08	575,39	599,08	607,86
<b>8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	<b>56.513,95</b>	<b>44.833,81</b>	<b>54.651,00</b>	<b>62.161,52</b>	<b>61.069,01</b>
8.1 Bank	11.124,51	10.623,60	11.080,37	11.265,74	9.276,21
8.2 lembaga Keuangan Non Bank	6.478,68	4.263,16	6.430,70	7.287,35	7.464,24
8.4 Sewa Bangunan	37.632,83	28.850,52	35.875,08	42.322,80	42.981,87
8.5 Jasa Perusahaan	1.277,93	1.096,53	1.264,85	1.285,63	1.346,69
<b>9. Jasa-Jasa</b>	<b>154.895,14</b>	<b>143.936,77</b>	<b>146.484,35</b>	<b>148.025,13</b>	<b>146.172,52</b>
a. Pemerintah Umum	99.789,58	94.670,26	95.486,73	96.384,31	97.509,12
b. Swasta	55.105,56	49.266,51	50.997,62	51.640,82	48.663,40
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	15.471,37	13.312,46	13.682,55	13.931,50	16.165,45
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	96,54	74,63	79,41	82,85	75,39
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	39.537,65	35.879,42	37.235,66	37.626,47	32.422,56
<b>PDRB</b>	<b>865.012,64</b>	<b>918.157,54</b>	<b>982.422,06</b>	<b>1.032.955,89</b>	<b>978.764,28</b>

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bojonegoro, 1999: 45

# Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 2: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Propinsi Jawa Timur Tahun 1994 – 1998  
(Juta Rupiah)

Sektor / Sub Sektor	1994	1995	1996	1997	1998
<b>1. Pertanian</b>	<b>9.666.049,56</b>	<b>9.866.092,64</b>	<b>10.253.902,38</b>	<b>10.360.819,63</b>	<b>9.789.757,89</b>
1.1 Tanaman Bahan Makanan	6.058.582,73	6.337.720,90	6.590.805,73	6.431.044,49	6.428.562,17
1.2 Tanaman Perkebunan	1.640.887,57	1.614.700,21	1.837.424,94	1.992.631,24	1.530.714,68
1.3 Peternakan	975.195,68	999.383,91	941.224,07	1.011.884,61	894.511,51
1.4 Kehutanan	285.191,79	262.955,72	266.103,35	259.298,47	233.198,69
1.5 Perikanan	706.191,79	651.331,89	618.344,29	665.960,82	702.770,83
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>955.206,92</b>	<b>970.066,58</b>	<b>982.419,95</b>	<b>875.522,36</b>	<b>501.798,67</b>
2.3 Penggalian	924.843,42	934.567,37	924.396,99	765.759,13	337.045,39
<b>3. Industri Pengolahan</b>	<b>13.990.976,06</b>	<b>15.802.744,64</b>	<b>17.698.276,00</b>	<b>19.409.565,65</b>	<b>14.942.780,83</b>
3.1 Makanan, Minuman dan Tembakau	7.094.110,69	8.212.794,73	9.125.480,43	10.142.324,72	7.776.595,74
3.2 Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	1.303.564,85	1.455.121,03	1.752.730,58	1.851.798,62	1.404.599,88
3.3 Industri Kayu dan Sejenisnya	843.792,49	890.624,53	1.062.704,42	1.109.386,04	779.859,88
3.4 Kertas, Percetakan dan Penerbitan	945.705,74	1.049.736,93	1.018.511,18	1.083.797,53	726.439,96
3.5 Kimia, Minyak Bumi, Karet dan Plastik	163.550,00	191.297,61	380.911,21	436.537,98	299.511,95
3.6 Barang Galian Non Logam	1.403.465,28	1.481.082,95	1.713.594,97	1.824.166,91	1.375.854,08
3.8 Barang dari Logam	996.018,87	1.154.245,30	1.170.357,58	1.362.884,06	1.282.377,21
3.9 Barang Lainnya	158.999,13	165.717,10	251.198,12	277.177,64	247.669,56
<b>4. Listrik, Gas dan Air Bersih</b>	<b>787.544,59</b>	<b>1.011.891,73</b>	<b>1.139.846,68</b>	<b>1.143.104,30</b>	<b>1.179.194,65</b>
4.1 Listrik	642.075,21	857.818,61	963.954,72	944.189,26	983.063,81
4.3 Air bersih	114.837,21	114.868,10	114.945,23	123.384,64	127.372,28
<b>5. Konstruksi</b>	<b>3.433.305,97</b>	<b>3.854.810,05</b>	<b>4.239.635,33</b>	<b>4.370.532,83</b>	<b>2.928.057,00</b>
<b>6. Perdagangan, Hotel dan Restoran</b>	<b>10.911.198,61</b>	<b>11.866.746,64</b>	<b>12.993.706,42</b>	<b>13.828.696,97</b>	<b>11.394.271,80</b>
6.1 Perdagangan	8.762.508,56	9.542.381,24	10.428.606,02	10.985.850,38	8.992.285,27
6.2 Hotel	475.186,44	501.040,93	510.244,62	520.634,88	517.420,36
6.3 Restoran	1.673.503,61	1.823.324,47	2.054.855,78	2.322.211,71	1.884.566,17
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>3.504.855,30</b>	<b>3.800.166,09</b>	<b>4.165.204,62</b>	<b>4.236.276,08</b>	<b>4.093.165,57</b>
a. Pengangkutan	3.075.146,01	3.288.540,30	3.449.166,45	3.420.221,61	3.181.349,12
1. Angkutan Rel	34.399,61	38.072,84	39.595,43	41.540,60	53.163,65
2. Angkutan Jalan Raya	1.889.323,77	2.030.107,56	2.110.793,47	2.024.865,52	1.846.962,09
6. Jasa Penumpang Angkutan	805.684,62	831.677,63	889.604,32	920.531,79	903.652,04
b. Komunikasi	429.709,29	511.625,79	716.038,17	816.054,47	911.816,45
1. Pos dan Telekomunikasi	419.086,20	492.435,43	681.563,21	774.937,45	855.940,61
2. Jasa Penunjang Komunikasi	10.623,09	19.190,36	34.474,97	41.117,02	55.875,84
<b>8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	<b>3.563.710,84</b>	<b>3.766.255,55</b>	<b>3.979.808,69</b>	<b>4.145.932,45</b>	<b>3.354.075,99</b>
8.1 Bank	1.226.053,60	1.294.504,88	1.363.466,61	1.410.356,84	894.231,30
8.2 Lembaga Keuangan Non Bank	422.664,75	449.001,20	483.641,61	500.965,90	378.901,63
8.4 Sewa Bangunan	1.077.633,98	1.138.931,52	1.179.990,41	1.229.140,66	1.120.204,64
8.5 Jasa Perusahaan	826.866,03	870.937,99	938.625,35	990.797,47	951.548,73
<b>9. Jasa-Jasa</b>	<b>5.914.632,87</b>	<b>6.101.730,07</b>	<b>6.302.065,91</b>	<b>6.483.125,59</b>	<b>6.153.170,85</b>
a. Pemerintah Umum	2.871.105,14	2.901.104,11	2.932.460,38	2.953.100,48	2.877.668,87
b. Swasta	3.043.527,73	3.200.625,96	3.369.605,53	3.530.025,11	3.275.501,98
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	703.372,75	718.168,73	742.012,93	811.388,96	670.793,46
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	28.711,07	31.132,14	33.794,70	37.819,16	29.078,72
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	2.311.443,91	2.451.325,09	2.593.797,90	2.680.816,99	2.575.629,80
<b>PDRB</b>	<b>52.727.480,72</b>	<b>57.040.503,99</b>	<b>61.754.865,98</b>	<b>64.853.575,86</b>	<b>54.336.273,26</b>

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, 1999 : 54

Lampiran 3: Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Dati II Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1994 – 1998(dalam persen)

No	Sektor	1994	1998
1.	Pertanian	43,29	45,08
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,23
3.	Industri Pengolahan	10,51	7,81
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,50	0,51
5.	Konstruksi	3,47	4,18
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,48	14,31
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,04	6,70
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,53	6,24
9.	Jasa-Jasa	17,91	14,93
		100,00	100,00

Sumber Data: Tabel 4, diolah



Lampiran 4: Kontribusi Sektoral PDRB Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1994 dan Tahun 1998 (dalam persen)

No	Sektor	1994	1998
1.	Pertanian	18,33	18,02
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,81	0,92
3.	Industri Pengolahan	26,53	27,50
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,49	2,17
5.	Konstruksi	6,51	5,39
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,69	20,97
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,65	7,53
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,76	6,17
9.	Jasa-Jasa	11,22	11,32
		100,00	100,00

Sumber Data: Lampiran 2, diolah.

Lampiran 5: Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 - 1998

No	Sektor	LQ				
		1994	1995	1996	1997	1998
1.	Pertanian	2,36194	2,49881	2,58691	2,70199	2,50219
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,14459	0,16931	0,17913	0,21868	0,25216
3.	Industri Pengolahan	0,39604	0,33104	0,31013	0,28702	0,28381
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,33400	0,22097	0,24052	0,27113	0,23548
5.	Konstruksi	0,53325	0,67372	0,67225	0,70263	0,77639
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,60293	0,70895	0,69179	0,68391	0,68234
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,75854	1,06064	1,15419	1,19473	0,88982
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,96656	0,73951	0,86315	0,94134	1,01069
9.	Jasa-Jasa	1,59642	1,46555	1,46115	1,43343	1,31879

Sumber : Lampiran 1 dan 2, diolah.

Lampiran 6: Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994

Sektor / Sub Sektor	$V_i^R / V^R$	$V_I / V$	LQ
1. Pertanian	0,43299	0,18332	2,36194
1.1 Tanaman Bahan Makanan	0,36042	0,11490	3,13681
1.2 Tanaman Perkebunan	0,02299	0,03112	0,73875
1.3 Peternakan	0,02646	0,01849	1,43104
1.4 Kehutanan	0,02194	0,00541	4,05545
1.5 Perikanan	0,00118	0,01339	0,08813
2. Jasa – jasa	0,17907	0,11217	1,59642
a. Pemerintah Umum	0,11536	0,05445	2,11864
b. Swasta	0,06370	0,05772	1,10360
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,01789	0,01334	1,34108
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,00011	0,00054	0,20370
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	0,04571	0,04384	1,04266
3. Pengangkutan dan Komunikasi	0,05042	0,06647	0,75854
a. Pengangkutan	0,04912	0,05832	0,84225
1. Angkutan Rel	0,00499	0,00065	7,67692
2. Angkutan Jalan Raya	0,04399	0,03583	1,22774
6. Jasa Penumpang Angkutan	0,00014	0,01528	0,00916
b. Komunikasi	0,00129	0,00815	0,15828
1. Pos dan Telekomunikasi	0,00113	0,00795	0,14214
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,00017	0,00020	0,85000
4. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan	0,06533	0,06759	0,96656
8.1 Bank	0,01286	0,02325	0,55312
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00749	0,00802	0,93392
8.4. Sewa Bangunan	0,04351	0,02044	2,12867
8.5 Jasa Perusahaan	0,00148	0,01568	0,09439

Sumber Data : Lampiran 1 dan 2, diolah.

Lampiran 7 : Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1995

Sektor / Sub Sektor	$V_i^R / V^R$	$V_i / V$	LQ
1. Pertanian	0,43222	0,17297	2,49881
1.1 Tanaman Bahan Makanan	0,35022	0,11111	3,15201
1.2 Tanaman Perkebunan	0,02405	0,02831	0,84952
1.3 Peternakan	0,03265	0,01752	1,86358
1.4 Kehutanan	0,02335	0,00461	5,06508
1.5 Perikanan	0,00195	0,01142	0,17075
2. Jasa – jasa	0,15677	0,10697	1,46555
a. Pemerintah Umum	0,10311	0,05086	2,02733
b. Swasta	0,05366	0,05611	0,95634
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,01449	0,01259	1,15091
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,00008	0,00055	0,14545
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	0,03908	0,04298	0,90926
3. Pengangkutan dan Komunikasi	0,07066	0,06662	1,06064
a. Pengangkutan	0,06829	0,05765	1,18456
1. Angkutan Rel	0,01118	0,00067	16,68657
2. Angkutan Jalan Raya	0,05679	0,03559	1,59567
6. Jasa Penumpang Angkutan	0,00032	0,01458	0,02195
b. Komunikasi	0,00236	0,00897	0,26309
1. Pos dan Telekomunikasi	0,00175	0,00863	0,20278
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,00061	0,00034	1,79412
4. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,04883	0,06603	0,73951
8.1 Bank	0,01157	0,02269	0,50992
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00464	0,00787	0,58958
8.4. Sewa Bangunan	0,03142	0,01997	1,57336
8.5 Jasa Perusahaan	0,00119	0,01527	0,07793

Sumber : Lampiran 1 dan 2, diolah.

Lampiran 8 : Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1996

Sektor / Sub Sektor	$V_i^R / V^R$	$V_I / V$	LQ
1. Pertanian	0,42953	0,16604	2,58691
1.1 Tanaman Bahan Makanan	0,34447	0,10673	3,22749
1.2 Tanaman Perkebunan	0,02619	0,02975	0,88034
1.3 Peternakan	0,03307	0,01524	2,16995
1.4 Kehutanan	0,02284	0,00431	5,29930
1.5 Perikanan	0,00296	0,01001	0,29570
2. Jasa – jasa	0,14911	0,10205	1,46115
c. Pemerintah Umum	0,09719	0,04749	2,04654
d. Swasta	0,05191	0,05457	0,95126
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,01393	0,01202	1,15890
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,00008	0,00055	0,14545
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	0,03790	0,04200	0,90238
3. Pengangkutan dan Komunikasi	0,07785	0,06745	1,15419
a. Pengangkutan	0,07556	0,05585	1,35291
1. Angkutan Rel	0,01166	0,00064	18,21875
2. Angkutan Jalan Raya	0,06355	0,03418	1,85927
6. Jasa Penumpang Angkutan	0,00035	0,01441	0,02429
b. Komunikasi	0,00228	0,01159	0,19672
1. Pos dan Telekomunikasi	0,00169	0,01104	0,15308
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,00059	0,00056	1,05357
4. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan	0,05563	0,06445	0,86315
8.1 Bank	0,01128	0,02208	0,51087
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00655	0,00783	0,83653
8.4. Sewa Bangunan	0,03652	0,01911	1,91104
8.5 Jasa Perusahaan	0,00129	0,01519	0,08492

Sumber : Lampiran 1 dan 2, diolah.

Lampiran 9 : Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupater Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1997

Sektor / Sub Sektor	$V_i^R / V^R$	$V_i / V$	LQ
1. Pertanian	0,43167	0,15976	2,70199
1.1 Tanaman Bahan Makanan	0,34551	0,09916	3,48437
1.2 Tanaman Perkebunan	0,02863	0,03073	0,93166
1.3 Peternakan	0,03231	0,01560	2,07115
1.4 Kehutanan	0,02227	0,00399	5,58145
1.5 Perikanan	0,00295	0,01027	0,28724
2. Jasa – jasa	0,14330	0,09997	1,43343
a. Pemerintah Umum	0,09331	0,04553	2,04942
b. Swasta	0,04999	0,05443	0,91843
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,01349	0,01251	1,07834
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,00008	0,00058	0,13793
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	0,03643	0,04134	0,88123
3. Pengangkutan dan Komunikasi	0,07804	0,06532	1,19473
a. Pengangkutan	0,07572	0,05274	1,43572
1. Angkutan Rel	0,01161	0,00064	18,14062
2. Angkutan Jalan Raya	0,06377	0,03122	2,04260
6. Jasa Penumpang Angkutan	0,00034	0,01419	0,02396
b. Komunikasi	0,00232	0,01258	0,18442
1. Pos dan Telekomunikasi	0,00174	0,01195	0,14561
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,00058	0,00063	0,92063
4. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan	0,06018	0,06393	0,94134
8.1 Bank	0,01091	0,02175	0,50161
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00705	0,00772	0,91321
8.4. Sewa Bangunan	0,04097	0,01895	2,16201
8.5 Jasa Perusahaan	0,00124	0,01528	0,08115

Sumber : Lampiran 1 dan 2, diolah.

Lampiran 10 : Perhitungan LQ Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1998

Sektor / Sub Sektor	$V_i^R / V^R$	$V_i / V$	LQ
1. Pertanian	0,45082	0,18017	2,50219
1.1 Tanaman Bahan Makanan	0,37001	0,11831	3,12746
1.2 Tanaman Perkebunan	0,02271	0,02817	0,80618
1.3 Peternakan	0,03272	0,01646	1,98785
1.4 Kehutanan	0,02250	0,00429	5,24476
1.5 Perikanan	0,00288	0,01293	0,22274
2. Jasa – jasa	0,14934	0,11324	1,31879
c. Pemerintah Umum	0,09962	0,05296	1,88104
d. Swasta	0,04972	0,06028	0,82482
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,01652	0,01235	1,33765
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,00008	0,00054	0,14815
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	0,03313	0,04740	0,69895
3. Pengangkutan dan Komunikasi	0,06703	0,07533	0,88982
b. Pengangkutan	0,06452	0,05855	1,10196
1. Angkutan Rel	0,00900	0,00098	9,18367
2. Angkutan Jalan Raya	0,05521	0,03399	1,62430
6. Jasa Penumpang Angkutan	0,00030	0,01663	0,01804
b. Komunikasi	0,00251	0,01678	0,14958
1. Pos dan Telekomunikasi	0,00189	0,01575	0,12000
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,00062	0,00103	0,60194
4. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,06239	0,06173	1,01069
8.1 Bank	0,00948	0,01646	0,57594
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00763	0,00697	1,09469
8.4. Sewa Bangunan	0,04391	0,02062	2,12949
8.5 Jasa Perusahaan	0,00138	0,01751	0,07881

Sumber : Lampiran 1 dan 2, diolah.



Lampiran 11 : Koefisien Pergeseran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1994 -1998

Sektor/Sub Sektor	1994					CR = $\frac{(6) - (7)}{100}$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	$\% V_{198}^R / V_{98}^m$	$\% V_{198}^m / V_{98}^m$	$\% V_{194}^R / V_{94}^m$	$\% V_{194}^m / V_{94}^m$	(2) - (4)	(3) - (5)	
1. Pertanian	45,08	18,02	43,29	18,33	1,79	-0,31	<b>0,0216</b>
1.1 Tanaman Bahan Makanan	37,00	11,83	36,04	11,49	0,96	0,34	0,0062
1.2 Tanaman Perkebunan	2,27	2,82	2,30	3,11	-0,03	-0,29	0,0026
1.3 Peternakan	3,38	1,65	2,65	1,85	0,73	-0,2	0,0093
1.4 Kehutanan	2,25	0,43	2,19	0,54	0,06	-0,11	0,0017
1.5 Perikanan	0,29	1,29	0,12	1,34	0,17	-0,05	0,0022
2. Pertambangan dan Pengalihan	0,23	0,92	0,26	1,81	-0,03	-0,89	<b>0,0086</b>
2.1 Pengalihan	0,23	0,62	0,26	1,75	-0,03	-1,13	0,0110
3. Industri Pengolahan	7,80	27,50	10,51	26,53	-2,71	0,97	<b>-0,0368</b>
3.1 Makanan, Minuman dan Tembakau	1,39	14,31	2,30	13,45	-0,91	0,86	-0,0177
3.2 Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	0,09	2,59	0,14	2,47	-0,05	0,12	-0,0017
3.3 Industri Kayu dan Sejenisnya	3,17	1,44	4,08	1,60	-0,91	-0,16	-0,0075
3.4 Kertas, Percetakan dan Penerbitan	0,27	1,34	0,41	1,79	-0,14	-0,45	0,0031
3.5 Kimia, Minyak Bumi, Karet dan Plastik	0,10	0,55	0,14	0,31	-0,04	0,24	-0,0028
3.6 Barang Galian Non Logam	2,38	2,53	2,89	2,66	-0,51	-0,13	-0,0038
3.8 Barang dari Logam	0,14	2,36	0,21	1,89	-0,07	0,47	-0,0054
3.9 Barang Lainnya	0,27	0,46	0,33	0,30	-0,06	0,16	-0,0022
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,51	2,17	0,50	1,49	0,01	0,68	<b>-0,0067</b>
4.1 Listrik	0,46	1,81	0,44	1,22	0,02	0,59	-0,0057
4.2 Air Bersih	0,05	0,23	0,06	0,22	-0,01	0,01	-0,0002
5. Konstruksi	4,18	5,39	3,47	6,51	0,71	-1,12	<b>0,0183</b>
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,31	20,97	12,48	20,69	1,83	0,28	<b>0,0155</b>
6.1 Perdagangan	12,98	16,55	11,47	16,62	1,51	-0,07	0,0158
6.2 Hotel	0,05	0,95	0,04	0,90	0,01	0,05	-0,0004
6.3 Restoran	1,28	3,47	0,97	3,17	0,31	0,30	0,0001



Lanjutan.....

7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,70	7,53	5,04	6,65	1,66	0,88	<b>0,0078</b>
a. Pengangkutan	6,45	5,86	4,91	5,83	1,54	0,03	0,0151
1. Angkutan Rel	0,90	0,09	0,49	0,07	0,41	0,02	0,0039
2. Angkutan Jalan Raya	5,52	3,39	4,39	3,58	1,13	-0,19	0,0132
b. Jasa Penumpang Angkutan	0,03	1,66	0,01	1,53	0,02	0,13	-0,0011
1. Komunikasi	0,25	1,68	0,13	0,82	0,12	0,86	-0,0074
2. Pos dan Telekomunikasi	0,19	1,58	0,11	0,79	0,08	0,79	-0,0071
3. Jasa Penunjang Komunikasi	0,06	0,10	0,02	0,02	0,04	0,08	-0,0004
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,24	6,17	6,53	6,76	-0,29	-0,59	<b>0,0030</b>
8.1 Bank	0,95	1,65	1,29	2,33	-0,34	-0,68	0,0034
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,76	0,69	0,75	0,80	0,01	-0,11	0,0012
8.4 Sewa Bangunan	4,39	2,06	4,35	2,04	0,04	0,02	0,0002
8.5 Jasa Perusahaan	0,14	1,75	0,15	1,57	-0,01	0,18	-0,0019
9. Jasa-jasa	14,93	11,32	17,91	11,22	-2,98	0,1	<b>-0,0308</b>
a. Pemerintah Umum	9,96	5,29	11,54	5,45	-1,58	-0,16	-0,0142
b. Swasta	4,97	6,03	6,37	5,77	-1,4	0,26	-0,0166
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	1,65	1,24	1,79	1,33	-0,14	-0,09	-0,0005
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,01	0,05	0,01	0,05	0	0	0
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	3,31	4,74	4,57	4,38	-1,26	0,36	-0,0162

Sumber Data : Lampiran 3 dan 4, diolah